

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan dan memahami demokrasi di dalam media sosial twitter dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual pada Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengguna metode penelitian kualitatif dan menggunakan paradigma non-positivisme, serta menggunakan perspektif pasca-strukturalis dan menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan penelitian menggunakan Heremeneutika-Gadamer. Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah demokrasi dan media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan adanya demokrasi dalam bentuk demokrasi deliberatif didalam media sosial twitter pada pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) pada tahun 2019. Pada pembahasan tersebut menunjukkan adanya interaksi yang menjadikan media sosial twitter sebagai wadah dalam berdemokrasi. Tetapi dalam interaksinya terbatas oleh pendapat yang cenderung homogen antara tagar #TolakRUUPKS dengan #SahkanRUUPKS. Pembahasan mengenai RUU P-KS sendiri masih berputar antara kelompok liberal dengan islam konservatif. Selain itu, dalam penelitian ini pada proses berdeliberasi banyak ditemui penggunaan *flooding* pada tagar #TolakRUUPKS yang digunakan untuk mempengaruhi pengguna twitter. Adanya hal tersebut, memiliki dampak yang begitu besar didalam kampanye RUU P-KS dikarenakan perbedaan yang cukup mencolok mengenai label liberal yang diberikan kepada RUU P-KS, dibandingkan dengan penolak RUU P-KS yang merupakan mayoritas muslim.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, twitter memiliki pengaruh terhadap adanya proses deliberasi didalam pembahasan mengenai RUU P-KS. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya interaksi antara kedua pendapat yang saling menyakatan pendapat dari perpektif masing-masing kelompok. Walaupun pada dasarnya kedua kelompok tersebut terbagi kedalam kedua gelembung berbeda. Tetapi, pada dasarnya proses demokrasi dalam berdeliberasi didalam media sosial twitter tetap terjadi walaupun memiliki pendapat yang homogen.

Kata Kunci: RUU P-KS (Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual), Twitter, Demokrasi.

SUMMARY

The purpose of this research to describe and understand the democratisation in twitter as a social media during the discussion of sexual violence abolition bill (RUU P-KS) in 2019. The method of this research is qualitative and non-positivism as paradigm, post-structuralism for the research and the perspective of this research is contrutivism, and research approach is heremeneutics-Gadamer. In gathering data for this research use literature study. The framework of thought used in this studies are social media and democracy.

The results showed deliberative democracy on twitter during the discussion abolition of sexual violence bill (RUU P-KS) in twitter in 2019. During the deliberation showed interaction between twitter and democracy and used as media to socialize. Although, in this research found in the deliberation process has the same topic between #TolakRUUPKS and #SahkanRUUPKS. The deliberation process frequently talking about the diversity between liberal group and islam conservative. Furthermore, in this research found in the deliberation process there is “flooding” which relate #TolakRUUPKS to influence twitter user. In this case has big impact to abolition of sexual violence bill due to the liberal label which gave before. Moreover, Indonesia is country which has islam as majority and #TolakRUUPKS enlivened by political deliberation of identity as main topic.

Based on the result of research, twitter has influence on deliberation process in abolition of sexual violence bill. In case of abolition of sexual violence bill showed interaction between a couple of opinion which contradictive and have their own perspective. Although, basically a couple group divided into different bubbles. However, the democratisation process in deliberation in social media keep happen even though has their own opinion which is homogeneous.

Keywords: abolition of sexual violence bill (RUU P-KS), Twitter, Democracy.